



BAB VII

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Beberapa kebijakan, program, kegiatan telah berhasil dan dirasakan oleh masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mencapai 77,24 pada tahun 2008. Nilai tersebut menempatkan posisi IPM Kabupaten Sleman pada peringkat 15 dari 477 kabupaten/kota. Selain itu, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat Sleman mendapat apresiasi baik di tingkat Nasional maupun provinsi, antara lain Manggala Karya Bakti Husada dari Menteri Kesehatan RI serta berbagai prestasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan sebagainya.

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan sistem layanan kepada masyarakat dengan pemenuhan standar ISO di bidang kesehatan.



Selama tahun 2009, terdapat beberapa urusan dalam pelaksanaannya kurang optimal antara lain disebabkan oleh masih dirasakannya dampak krisis ekonomi global. Faktor ini menyebabkan beberapa target kegiatan dan program tidak tercapai dan beberapa capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, antara lain terjadinya penurunan volume dan nilai ekspor. Sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,13 menjadi 4,53.

Kendala dan permasalahan yang juga dirasakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masih adanya ketidakjelasan pengelolaan urusan yang diatur dalam perundang-undangan dari pemerintah pusat. Disamping itu terdapat pula peraturan perundang-undangan yang ambivalen, kontradiktif, dan tidak jelas serta sering berubah-ubah.

Pada masa-masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Sleman akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Sleman, maka untuk tahun 2010 kebijakan difokuskan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
3. Menjaga kualitas kesehatan
4. Peningkatan kualitas pendidikan
5. Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal
6. Menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam